

SKRIPSI

RELEVANSI INDEPENDENSI KELEMBAGAAN DENGAN MEKANISME

PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Disusun Oleh :
UNIVERSITAS ANDALAS

GITA AULIA PUTRI

BP.1210111042

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)



Pembimbing :

Prof. Dr. SaldiIsra. SH., MPA

FeriAmsari, SH., MH., LL.M

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

	No. Alumni Universitas:	GITA AULIA PUTRI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl. Lahir: Sungai Dareh/20 November 1994f) Tanggal Lulus: 16 Januari 2017 b) Nama Orang Tua: Ajisman dan Enizarti g) Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan c) Fakultas: Hukum h) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan d) Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI) i) IPK : 3,62 e) No. BP : 1210111042 j) Alamat : Kab. Dharmasraya, Sungai Dareh		

RELEVANSI INDEPENDENSI KELEMBAGAAN DENGAN MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(Gita Aulia Putri, 1210111042, Fakultas Hukum Unand, 2016, 144 Halaman)

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu lembaga negara independen yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Independen berarti bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, keindependensian lembaga KPK adalah sebuah keharusan yang harus diwujudkan, independensi itu tidak hanya diukur dari tugas dan wewenang KPK, namun jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana mekanisme pemilihan pimpinan lembaga KPK juga independen tanpa adanya intervensi politik dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan KPK. Terutama yang harus diwaspadai adalah bagaimana intervensi politik dari DPR dan presiden tidak mempengaruhi keindependensian lembaga KPK. Atas dasar perwujudan relevansi sifat independensi kelembagaan KPK dengan mekanisme pemilihan pimpinan KPK dengan tujuan penguatan lembaga KPK melalui penataan ulang pemilihan pimpinan lembaga, penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan permasalahan *Pertama*, mengenai bagaimana proses seleksi pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, bagaimana penguatan lembaga KPK sebagai lembaga negara independen. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif melalui penelitian hukum dengan melihat berbagai aturan hukum, mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan lembaga KPK dan dengan menggunakan metode perbandingan dengan beberapa negara yang juga memiliki lembaga pemberantasan korupsi. Sejak hadirnya KPK dalam ketatanegaraan Indonesia dalam mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, lembaga KPK memberikan warna baru dalam ketatanegaraan Indonesia.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 16 Januari 2017. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Afriani, S.H., M.H.	Alsyaam, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Charles Simabura, S.H., M.H.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

